

**PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
MEKAR JAYA OLEH PEMERINTAH DESA PULOERANG
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS**

Maryati

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : Maryatisuarman5722@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes merupakan salah satu alternatif dalam membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah BUMDes tersebut tidak akan bisa berkembang atau berjalan dengan baik tanpa pembinaan dari Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Desa setempat. Namun demikian pada faktanya, terlihat bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Puloerang belum melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembinaan BUMDes tersebut. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa Pembinaan BUMDes oleh Pemerintah Desa di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian maka secara umum diketahui bahwa Pembinaan BUMDes Mekar Jaya belum optimal, hal ini terutama terlihat dari beberapa indikator. Yaitu “Mengintensifikan upaya penumbuhkembangan BUM Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa”. Selain itu pada kenyataannya belum banyak UMKM yang tercover atau ternaungi oleh BUMDes Mekarjaya. Mayoritas UMKM yang sudah tergabung pun belum secara sepenuhnya merasakan peningkatan ekonomis dari adanya BUMDes. Kemudian pada indikator “meningkatkan kompetensi SDM Tim pembina, tim teknis, serta pengelola atau pelaksana dalam penumbuhkembangan BUM Desa”. Kesenjangan informasi antara tim pembina dengan tim teknis berujung pada munculnya persepsi masing-masing. Inilah yang menjadikan saling menyalahkan antara pihak-pihak tersebut.

Kata Kunci : *Pembinaan, BUMDEs, Puloerang, Mekarjaya*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mengembangkan potensi desa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai kesempatan untuk secara kreatif mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat

untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di antara sekian banyak aspek yang menjadi tujuan bersama dari sebuah organisasi Pemerintah, terutama dalam hal ini Pemerintah dengan cakupan terkecil yaitu Desa adalah

sektor ekonomi. Pemerintah Desa perlu berupaya untuk memaksimalkan sektor ekonomi sekitar dengan memperhatikan, menilai, serta memanfaatkan keanekaragaman potensi di wilayah tersebut sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan mencapai taraf hidup yang sejahtera.

Kemampuan pemerintah Desa dalam mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi ekonomi di masyarakat merupakan faktor penggerak dominan untuk peningkatan ekonomi yang terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Hal tersebut salah satunya bisa diwujudkan dalam pembentukan BUMDes. Lembaga ini sejautinya mampu untuk menjadi induk yang mencakup beragam usaha, yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Desa sekaligus merupakan solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, Pemerintah Desa haruslah mampu untuk memberikan perhatian secara maksimal terhadap Eksistensi BUMDes tersebut. Pemerintah Desa harus memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan bagi BUMDes, yang nantinya akan menaungi produk-produk yang ada di wilayah tersebut, untuk kemudian ditingkatkan nilai jualnya.

Pemerintah Desa sebagai Pihak yang memberi legalitas pada BUMDes harus mengarahkan dan mendukung BUMDes untuk mampu

mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi usaha yang ada dan berkembang di wilayah Desa, karena merupakan aset yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan ekonomi Desa. Hal ini perlu dilakukan dengan cara membina BUMDes tersebut agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah BUMDes tersebut tidak akan bisa berkembang atau berjalan dengan baik tanpa pembinaan dari Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Desa setempat. Sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat di wilayah terkecil, maka Pemerintah Desa seharusnya bisa berperan aktif untuk membina BUMDes sebagai wadah untuk berkembangnya potensi usaha di Desa.

Namun demikian, pada faktanya di lapangan, khususnya di wilayah Desa, ternyata peran yang signifikan dari Pemerintah Desa terhadap eksistensi BUMDes masih kurang. Dengan kata lain masih banyak faktor yang menghambat optimalnya output yang dihasilkan dari BUMDes di wilayah Desa, terutama yang diakibatkan oleh kurangnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembinaan. Sebagai contoh, hal ini terjadi di Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.

Meskipun Desa ini sudah memiliki BUMDes, yang secara resmi didirikan mengacu pada Peraturan Desa Puloerang No. 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik

Desa, ternyata BUMDes ini masih belum mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Padahal, besarnya potensi serta kemanfaatan atas eksistensi dan optimalnya BUMDes di desa ini haruslah segera disadari oleh Pemerintah Desa Puloerang dan diwujudkan dalam langkah-langkah pembinaan terutama menyangkut organisasi secara lebih sistematis.

Pada faktanya, terlihat bahwa Pemerintah Desa Puloerang belum melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembinaan BUMDes tersebut. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa Pembinaan BUMDes oleh Pemerintah Desa di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal.

KAJIAN PUSTAKA

1. Organisasi

Menurut Hasibuan (2011: 120): “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut pendapat ini jelaslah bahwa yang dikatakan organisasi harus bersifat resmi dan memiliki program atau struktur yang jelas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut William Schulze dalam Sutarto (2006: 23): “Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan

efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat ini dapat difahami bahwa sumber daya yang ada dalam sebuah Organisasi sangatlah beragam dan semuanya tersebut haruslah diatur dan dikelola sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan Organisasi tersebut dapat tercapai.

Menurut Morgan (1986: 51): Organisasi seperti citra bergerak (*images in motion*) yakni *machine, organism, brain, culture, political system, psychic prison, transformation, dan domination*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang bekerja dengan segala faktor pendukung yang ada di dalamnya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Pemerintah Daerah pun dalam hal ini merupakan sebuah organisasi, dan organisasi ini harus senantiasa bekerja semaksimal mungkin agar dapat tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat.

2. Pembinaan & Pembinaan Organisasi

Menurut Thoha (2008: 207), “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu

tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjuk kepada "perbaikan" atas sesuatu.

Selanjutnya Thoha (2008: 209) juga menjelaskan, "Pembinaan Organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi, dengan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku".

Secara lebih jauh, unsur-unsur pokok dari preskripsi atau persyaratan dalam pembinaan organisasi mencakup:

Berencana dan berjangka panjang. Organisasi secara keseluruhan Dikelola Efektivitas dan kesehatan Organisasi Intervensi yang berencana Pengetahuan Ilmu Perilaku

Selain itu Thoha (2008: 216) juga menjelaskan bahwa tujuan umum dalam pembinaan organisasi mencakup:

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan di antara para anggota organisasi.

Untuk meningkatkan kesadaran berkonfrontasi dengan masalah-masalah organisasi, baik dalam kelompok ataupun di antara anggota-anggota kelompok.

Meningkatkan suatu lingkungan "kewenangan dalam tugas" yang didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan.

Untuk meningkatkan tingkat keterbukaan dalam berkomunikasi baik vertikal, horizontal, maupun diagonal.

Untuk meningkatkan tingkat kesemangatan dan kepuasan orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Untuk mendapat pemecahan yang sinergistik terhadap masalah-masalah yang mempunyai frekuensi yang besar.

Untuk meningkatkan tingkat pertanggung jawaban pribadi dan kelompok baik di dalam pemecahan dan implementasi rencana.

3. Badan Usaha Milik Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari dua payung hukum ini dapat difahami bahwa BUMDes merupakan sebuah lembaga yang dimiliki dan harus dibina oleh Desa untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri terutama yang terlibat dalam kegiatan usaha yang dinaungi BUMDes tersebut.

Komroesid (2016: 5), menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Maryuani (2008: 35) mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

beberapa teori ini pun senada dengan dua payung hukum yang dibahas sebelumnya yaitu menjelaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga yang berada di bawah Desa dan mewadahi kegiatan-kegiatan perekonomian di sebuah Desa untuk peningkatan kesejahteraan.

Secara spesifik dalam BAB I Pasal 11 Peraturan Desa Puloerang No. 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.

Kemudian dalam BAB II Pasal 2, dijelaskan bahwa: Maksud pembentukan BUMDesa Puloerang adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Puloerang.

Selain itu pada BAB IV Pasal 6 dijelaskan mengenai fungsi BUMDesa Puloerang adalah:

Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Puloerang;

Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Puloerang;

Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Puloerang.

Pasal-pasal tersenut merupakan pernyataan atau komitmen tertulis Pemerintah Desa Puloerang dalam membentuk BUMDes Puloerang untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja membutuhkan realisasi yang maksimal terutama terkait aspek pembinaan organisasinya.

4. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Wijaya (2018: 147), pembinaan BUMDes diarahkan dalam rangka:

Terciptanya penguatan kapasitas dan peranan BUM Desa agar menuju peningkatan perekonomian desa.

Terwujudnya BUM Desa yang tangguh dan handal sebagai motor penggerak suatu perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta Pendapatan Asli Desa.

Terselenggaranya BUM Desa yang dapat mengoptimalkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, melalui memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terwujudnya BUM Desa efektif dan efisien sehingga bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Secara lebih jauh Wijaya (2018: 150), strategi yang diterapkan dalam pembinaan BUM Desa adalah sebagai berikut:

Strategi dasar, dengan Indikator sebagai berikut :

Mengintensifikasikan upaya penumbuhan BUM Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Menjalin kerjasama kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Menjalankan keterpaduan dan sinergi dengan pendekatan sektoral, kewilayahan, serta partisipatif di dalam penumbuhan BUM Desa.

Strategi operasional, dengan Indikator sebagai berikut :

Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga atau organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara strategis dalam penumbuhan BUM Desa.

Menguatkan peran pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta desa sebagai tim pembina dan tim teknis BUM Desa.

Menumbuhkembangkan BUM Desa sebagai suatu lembaga yang unggul, efisien, dan efektif, serta tangguh sehingga dipercaya, mengakar, dan akuntabel.

Mengoptimalkan peran stakeholders dalam penumbuhan BUM Desa.

Melestarikan, mengembangkan, serta mendayagunakan kearifan lokal desa yang mengutamakan prakarsa dan inisiatif untuk penumbuhan BUM Desa.

Meningkatkan kompetensi SDM Tim pembina, tim teknis, serta pengelola atau pelaksana dalam penumbuhan BUM Desa.

Menerapkan konsep partisipatif sosial serta ekonomi secara seimbang, konsisten, dinamis, dan berkelanjutan.

Menyediakan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menguraikan secara mendalam fakta yang ada di lapangan secara natural dan akurat. Maka dari itu untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk menggambarkan dan mengungkapkan fenomena yang terjadi pada obyek yang sedang diteliti.

Sugiyono (2016: 8) menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci ...”.

Moleong (2014: 9) mengungkapkan bahwa “Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.”

Secara lebih jauh, Moleong (2014: 6) mengemukakan bahwa: Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya pembinaan mengarah pada adanya kemajuan, peningkatan atau perkembangan atas sesuatu. Oleh karena itu pada prakteknya, pembinaan diwujudkan dalam serangkaian strategi tertentu untuk mencapai kemajuan kondisi tersebut. Strategi tersebut haruslah dilakukan secara terstruktur oleh pelaku pembinaan terhadap objek pembinaan itu sendiri agar mencapai hasil yang maksimal.

Dalam konteks penelitian ini, pembinaan dilakukan oleh pihak Desa Puloerang terhadap BUMDes Mekar Jaya. Desa Puloerang tentunya telah melakukan serangkaian hal terkait pembinaan BUMDes, dalam hal ini BUMDes Mekar Jaya. Namun demikian, melalui proses penjajagan diketahui bahwa ada hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut sehingga kualitasnya belum maksimal. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Inilah yang akan dibahas di dalam Bab ini dengan mengacu pada alat ukur sebagai cara untuk menilai apakah pembinaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Alat ukur yang dipakai

tersebut adalah yang disampaikan oleh Wijaya (2018: 150), mengenai strategi yang diterapkan dalam pembinaan BUM Desa. Hal tersebut meliputi:

1. Strategi dasar, dengan Indikator Sebagai berikut:

- a) Mengintensifikasikan upaya penumbuhkembangan BUM Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
- b) Menjalin kerjasama kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
- c) Menjalankan keterpaduan dan sinergi dengan pendekatan sektoral, kewilayahan, serta partisipatif di dalam penumbuhkembangan BUM Desa.

2. Strategi operasional, dengan Indikator Sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga atau organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara strategis dalam penumbuhkembangan BUM Desa.
- b) Memperkuat peran pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta

desa sebagai tim pembina dan tim teknis BUM Desa.

- c) Menumbuhkembangkan BUM Desa sebagai suatu lembaga yang unggul, efisien, dan efektif, serta tangguh sehingga dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d) Mengoptimalkan peran stakeholders dalam penumbuhkembangan BUM Desa.
- e) Melestarikan, mengembangkan, serta mendayagunakan kearifan lokal desa yang mengutamakan prakarsa dan inisiatif untuk penumbuhkembangan BUM Desa.
- f) Meningkatkan kompetensi SDM Tim pembina, tim teknis, serta pengelola atau pelaksana dalam penumbuhkembangan BUM Desa.
- g) Menerapkan konsep partisipatif sosial serta ekonomi secara seimbang, konsisten, dinamis, dan berkelanjutan.
- h) Menyediakan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir secara efektif dan efisien.

Pada prinsipnya, dimensi pertama yang digunakan dalam penelitian ini secara umum berbicara tentang sejauh

mana penumbuhkembangan BUMDEs. Hal tersebut bisa dilihat dari dua cakupan aspek. Yang pertama bersifat eksternal, terutama berkaitan dengan sudah atau belum adanya kemitraan yang dilakukan dengan pihak luar. Sedangkan aspek kedua bersifat internal, dalam arti sejauh manakah BUMDes ini mampu berpadu dan bersinergi dengan masyarakat sekitar, dan mampu meningkatkan kualitas mereka khususnya UMKM yang ada untuk bisa mengelola, menjalankan, dan mengembangkan usahanya dengan baik.

Namun demikian bila memperhatikan dimensi ini, dalam konteks BUMDEs Mekarjaya, kualitasnya masih kurang. karena pada prinsipnya pembinaan belum berjalan dengan maksimal. Baik Desa sebagai pihak yang melakukan pembinaan, maupun BUMDes yang menjalankan kegiatan belum memiliki persepsi yang sama. Dengan kata lain komunikasinya belum harmonis. Sebagai contoh, dalam hal permodalan di satu sisi Desa belum bisa menaruh kepercayaan karena menganggap BUMDes belum mampu mengelola, sedangkan di sisi lain BUMDes menganggap bahwa hal ini sebagai bentuk kurangnya perhatian Desa dalam membina dan mendukung BUMDes. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas BUMDes ini menunjukkan hasil yang maksimal, baik dalam aspek eksternal maupun internal.

Pada prinsipnya, dimensi kedua yang digunakan dalam penelitian ini berisi indikator-indikator yang lebih

bersifat spesifik. Dengan kata lain lebih menyorot tugas dan fungsi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes secara lebih detil. Sehingga indikator-indikator ini lebih menyorot hal-hal apa saja yang perlu dilakukan para SDM dalam kaitannya dengan BUMDes mengacu pada kapasitasnya masing-masing baik pembina maupun pelaksana teknis.

Namun demikian, analisis setiap indikator pada dimensi ini pada umumnya beraa pada kualitas kurang baik. artinya perlu banyak perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian maka secara umum diketahui bahwa Pembinaan BUMDes Mekar Jaya belum optimal, hal ini terutama terlihat dari beberapa indikator. Yaitu indikator ke 1 dalam dimensi ke 1 yaitu “Mengintensifikasikan upaya penumbuhkembangan BUM Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa”. hal yang menjadi patokan adalah bahwa meskipun sudah ada BUM Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa belum secara signifikan meningkat. Selain itu pada kenyataannya belum banyak UMKM yang tercover atau ternaungi oleh BUMDes Mekarjaya. Mayoritas UMKM yang sudah tergabung pun belum secara sepenuhnya merasakan peningkatan ekonomis dari adanya BUMDes.

Kemudian pada indikator 1 yaitu “meningkatkan kompetensi SDM Tim pembina, tim teknis, serta pengelola atau pelaksana dalam

penumbuhkembangan BUM Desa". Hal yang menjadi tolak ukur adalah bahwa masih adanya kesenjangan informasi antara tim pembina yaitu dalam hal ini Desa Puloerang dengan tim teknis yaitu BUMDEs Mekarjaya, dikarenakan kurangnya sinergi. Kesenjangan informasi antara tim pembina dengan tim teknis berujung pada munculnya persepsi masing-masing. Inilah yang menjadikan saling menyalahkan antara pihak-pihak tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dianalisis bahwa apabila pembinaan terkait BUMDES Mekarjaya oleh Desa Puloerang belum optimal, maka akan berdampak pada proses kerja manajemen atau pengelolaan BUMDes itu sendiri sebagai salah satu potensi ekonomi di wilayah tersebut. keberadaan BUMDes seharusnya memberi kontribusi yang signifikan bagi Desa dan masyarakat sekitar. Bagi Desa karena BUMDes merupakan salah satu penopang bagi perekonomian Desa, begitu pun secara langsung bagi potensi usaha yang ada di Desa tersebut dalam hal ini UMKM, seharusnya mereka merasa ternaungi dan terberdayakan dengan adanya BUMDes, namun hal ini belum terjadi di desa Puloerang. Di sisi lain, kurangnya kesmaan persepsi antara pihak yang terlibat menunjukkan kekurangharmonisan yang sangat berdampak pada kualitas BUMDes ini, terutama berkaitan dengan kemampuan SDM. Di satu sisi, BUMDes sebagai

tim teknis merasa kurang diperhatikan dan diberdayakan, sedangkan Desa dan intitusi diatasny merasa sudah memberikan fasilitas dan pendukung secara proporsional. Ini merupakan persoalan inti yang harus segera mendapatkan titik temu. Serangkaian perbaikan haruslah dilakukan agar BUMDes ini semakin berkembang dan tidak berada pada titik stagnan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan melakukan observasi dan wawancara di lapangan terkait Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Oleh Pemerintah Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, maka dilakukan analisis dan pembahasan dan didapatkan temuan untuk kemudian dijadikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum diinventarisirnya beberapa usaha sebagai potensi yang eksis di wilayah Desa Puloerang. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu kondisi SDM yang berkecimpung dalam pengelolaan BUMDes terlihat belum menguasai sepenuhnya terkait hal-hal teknis yang ada dalam BUMDes terutama dalam penelusuran potensi dan pengelolaan data. Para SDM yang ada belum nbisa memetakan potensi usaha yang ada dan kemudian memasukannya pada dokumen yang seharusnya seperti profil desa maupun profil BUMDes.

- 2) Minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh para aparat Pemerintah Desa yang terlibat di dalam BUMDes tentang eksistensi usaha-usaha yang ada di Desa ini. Hal ini dikarenakan oleh adanya permasalahan terkait aspek legalitas yaitu belum adanya SK penugasan para pengurus BUMDes melalui Musdes. Sehingga SDM yang anda cenderung masih bekerja secara setengah hati. Secara umum, motivasi dan profesionalisme mereka masih kurang.
- 3) Kurangnya kemampuan dan pengalaman para pengurus BUMDes dalam mengelola dan memberdayakan UMKM. Sehingga masyarakat dalam hal ini UMKM yang berpartisipasi di BUMDes sangat sedikit, meskipun sudah banyak UMKM di wilayah ini, kebanyakan dari mereka mengelola usahanya sendiri tanpa keterkaitan dengan BUMDes. peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa belum secara signifikan meningkat. Selain belum banyak UMKM yang tercover oleh BUMDes, yang sudah tergabung pun belum secara sepenuhnya merasakan peningkatan ekonomis dari adanya BUMDes.
- 4) Belum ada program peningkatan kualitas secara formal terutama dalam bentuk pembinaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pembinaan yang selama ini dilakukan kurang maksimal terutama berkaitan dengan cakupan pembinaan yang baru diadakan hanya tingkat kabupaten, belum sampai cakupan desa, baik atas prakarsa desa sendiri maupun dari pihak yang lebih tinggi yaitu kabupaten.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) mengirim para SDM yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan BUMDes pada program pelatihan yang sesuai terutama berkaitan dengan pengelolaan data. Program pelatihan ini bisa diikuti pada lingkup instansi pemerintahan maupun secara langsung pada instansi non pemerintahan yang memang khusus ahli dalam bidang pengelolaan data.
- 2) Pihak Desa sebagai induk dari BUMDes haruslah segera menerbitkan SK terkait penugasan dalam BUMDes. Di dalamnya harus secara lengkap membahas tugas pokok dan fungsi, serta hak dan kewajiban para pengurus. Hal ini akan secara langsung memperkuat kinerja para SDM dari aspek legal.

- 3) BUMDes harus lebih merangkul masyarakat sekitar dengan membuat sosialisasi terkait manfaat bergabungnya UMKM dalam naungan BUMDes. sosialisasi ini selain mengundang masyarakat yang berkepentingan (UMKM) juga harus dilakukan secara door to door, dengan cara survey dan mendatangi langsung ke UMKM yang ada di desa ini.
- 4) pembinaan secara komprehensif menyangkut segala hal yang ada dalam pengelolaan BUMDes harus segera dilakukan. Jika pihak kabupaten belum bisa memfasilitasi, maka pihak desa lah yang harus berinisiatif mengadakan sendiri program pembinaan ini. Pembinaan bisa dilakukan dalam hal ini dari aspek keorganisasiannya, yaitu desa memberikan pembinaan dalam kapasitasnya sebagai lembaga dari induk BUMDes itu sendiri, maupun dari aspek teknis yaitu mengundang narasumber yang berkompeten dalam hal teknis pengelolaan BUMDes.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Komroesid, Herry. 2016. *Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Maryunani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sedermayanti. 2014. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

- Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, 2007. Manajemen Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta